Tinjauan Secara Kritis Reformasi Pendidikan Nasional

85 TAHUN TRIBUTE TO
PROF H.A.R. TILAAAR

**MEDIA
INDONESIA**
PUBLISHING

**TINJAUAN SECARA KRITIS REFORMASI
PENDIDIKAN NASIONAL**

85 Tahun Tribute to Prof H.A.R. Tilaar

© 2017 H.A.R Tilaar

Designed by Media Indonesia Publishing

Published by

H.A.R Tilaar

email : alextilaar32@gmail.com

All rights reserved

No part of this book may be reproduced or transmitted in any
form without the prior written permission of the copyright
owner.

ISBN :

ISBN 978-602-61879-0-1

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	vii
GURU, PILAR UTAMA MUTU PENDIDIKAN	1
PERSPEKTIF MULTIKULTURAL KRITIS BAGI PENGEMBANGAN KAPASITAS GURU/PENDIDIK GURU DAN PEMBELAJAR BAHASA ASING Oleh Joseph Ernest Mambu Universitas Kristen Satya Wacana	9
PROFESI GURU DI SIMPANG JALAN Oleh Jimmy Ph. Paat. Ade Irawan, Bambang Wisudo	29
ETNOPEDAGOGI SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN Oleh Unifah Rosyidi	65
KURIKULUM: SUATU TINJAUAN KRITIS Oleh S. Hamid Hasan	84
MERINTIS ILMU PENDIDIKAN BERFILOSOFI PANCASILA YANG MEMERDEKAKAN Oleh Edi Subkhan	103
TANTANGAN PANCASILA: GLOBALISASI DAN IDEOLOGI TRANS NASIONAL SERTA WATAK KEABADIAN PANCASILA Oleh Mahnan Marbawi	131
MENUMBUHKAN KEMERDEKAAN BERPIKIR Oleh Henny Supolo Sitepu	162

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Studi Kritis Implementasi Pendidikan di Indonesia

Oleh: Dedi Djubaedi 171

PENDIDIKAN AGAMAIS-NASIONALIS UNTUK KEUTUHAN NKRI

Oleh: Dr. Muhammad Kosim, MA 191

KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

Oleh Kamanto Sunarto

Departemen Sosiologi FISIP-UI 209

OTONOMI PENDIDIKAN TINGGI, DALAM KONTEKS MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Bedjo Sujanto 224

RETRET BESAR PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh Ir Bagus Siswanto 235

MENBANGUN SDM TIDAK CUKUP DENGAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Oleh : Soekirman

Guru Besar (Em.) IPB, Bogor / Ketua Institut Gizi

Indonesia 261

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASIONAL DI INDONESIA

Oleh Eka T.P. Simanjuntak 269

IKUT MEMBANGUN ANAK BANGSA?

Oleh E Baskoro Poedjinoegroho, SJ 285

BAB I

UPAYA MENJAGA DAN MELESTARIKAN BUDAYA
DAN EKSISTENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA 293

PENDIDIKAN AGAMA IS-NASIONALIS UNTUK KEUTUHAN NKRI

Oleh: Dr. Muhammad Kosim, MA¹

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang unik. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 1.128 suku bangsa (data BPS) dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau), yang membentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS, dan dari 94° 45' BT hingga 141° 05' BT.² Semua itu merupakan anugerah Tuhan yang sejatinya menjadi kekuatan sekaligus unsur pemersatu bangsa Indonesia. Indonesia bukanlah negara agama dan tidak pula negara sekuler. Sebelum kemerdekaannya, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang beragama dan berbudaya. Merekalah yang berjuang mengusir para penjajah, merebut kemerdekaan, lalu mendirikan dan membangun negara. Mereka juga menyadari realitas keberagaman sehingga bersepakat untuk bersatu dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika). Konsensus itu pun dirumuskan dalam dasar negara, Pancasila. Falsafah Pancasila mengakomodir kepentingan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agama hadir memperkuat karakter bangsa untuk membangun negara yang berkeadaban dan berperadaban. Negara tampil melindungi dan memelihara kehidupan beragama. Masyarakat yang taat pada agama dan berjiwa nasionalis merupakan dua modal utama untuk membangun NKRI sebagai negeri yang mandiri, khas, dan berkualitas.

Hubungan antar agama dan negara harus tetap dirawat dan diperkuat. Namun tidak jarang masyarakat terkotak-kotak dengan munculnya dua kubu yang bertentangan, bahkan dibenturkan; kelompok agamis dan nasionalis. Kondisi itu dipertontonkan oleh media sehingga

¹ Penulis adalah Dosen Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, kolumnis dan pegiat Pendidikan Karakter.

² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 1

mempengaruhi opini masyarakat. Sebut saja pandangan terhadap kubu agamais sebagai “kelompok kanan”, fundamental dan kurang memiliki loyalitas terhadap negara, lalu dinilai sebagai ancaman bagi kelangsungan NKRI. Apalagi Indonesia bukanlah “negara agama”. Sebaliknya kubu nasionalis dipandang sebagai kelompok sekuler yang mengabaikan nilai-nilai agama. Jika mereka beragama Islam, dianggap sebagai *Islam Abangan*, bergama hanya formalitas, atau hanya memandang agama sebagai urusan pribadi; antara individu dengan Tuhan. Lalu agama pun tak perlu dibawa-bawa untuk mengurus negara.

Paradigma di atas mesti diakhiri. Kelompok agamais dan nasionalis jangan diciptakan, dipilah, apalagi dipertentangkan. Kita harus menjadi orang yang taat beragama sekaligus memiliki komitmen dan loyalitas terhadap kesatuan NKRI. Untuk membentuk dan merawat paradigma itu, akan efektif dilakukan melalui pendidikan. Hemat penulis, berkembangnya pemahaman dikotomis antar agama dan negara turut dipicu oleh sistem pendidikan yang berkembang selama ini. Adanya dualisme pendidikan antara lembaga pendidikan agama dan pendidikan umum boleh jadi melahirkan paradigma dikotomis.³ Maka perlu memperkuat pendidikan agamais-nasionalis untuk menjaga dan merawat masyarakat Indonesia yang taat pada agama dan loyal pada negara.

H. A. R. Tilaar, tokoh pendidikan nasional terkemuka juga banyak menulis tentang potret pendidikan ideal yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Di antara gagasannya tentang pendidikan multikultural, pedagogik transformatif, desentralisasi pendidikan, hingga pentingnya membangun identitas bangsa melalui pendidikan agaknya relevan dengan gagasan pendidikan agamais-nasionalis yang penulis tawarkan.

³ Pada hakikatnya ilmu dan agama merupakan anugerah dari Tuhan, karena itu dikotomi antara keduanya harus dihindari. Alam penuh dengan tanda-tanda, pesan-pesan Ilahi yang menunjukkan kehadiran kesatuan system global. Semakin jauh ilmuwan mendalami sains, dia akan memperoleh *wisdom* berupa *philosophic perennis* atau *transcendence*. Iman tidak bertentangan dengan sains karena iman adalah rasio dan rasio adalah alam. Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 44-45

B. Pengertian Pendidikan Agamais-Nasionalis

Pendidikan agamais-nasionalis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya mengintegrasikan antara pendidikan agama dan pendidikan nasionalisme. Keduanya bukanlah bertolakbelakang, bertentangan, atau dikotomis, tetapi bergandengan bahkan saling menguatkan. Pendidikan agamais adalah pendidikan yang berdasarkan agama atau pendidikan yang menumbuhkembangkan potensi beragama seseorang secara maksimal.⁴ *Core*-nya tentu ajaran agama. Bukan berarti sekolah menjadi homogen, seperti madrasah atau pesantren, tetapi di sekolah peserta didik difasilitasi untuk berproses menjadi insan religius. Dalam hal ini, guru yang seagama dengan peserta memiliki tanggungjawab untuk mendidik sikap keberagamaan peserta didik.

Sedangkan pendidikan nasionalis adalah upaya menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik. Untuk mempertegas identitas dan merawat kesatuan bangsa, semangat nasionalisme menjadi modal utama. Karena alasan nasionalisme itu pula yang merekat keberagaman, baik etnis, budaya, bahasa, bahkan agama. Seperti yang diakui oleh H.A.R Tilaar, kelompok-kelompok etnis nusantara yang bersatu telah membangun nasionalisme Indonesia yang mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Dengan berdirinya negara Indonesia diikrarkanlah Pancasila sebagai sumpah Bangsa Indonesia. Dengan demikian nasionalisme Indonesia dilengkapi dengan nilai-nilai ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan.⁵

Dengan demikian, pendidikan agamais-nasionalis adalah upaya sadar untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang taat menjalankan ajaran agama dan memiliki loyalitas terhadap kesatuan NKRI. Pendidikan agamais-nasionalis merupakan penguatan pendidikan agama dan semangat nasionalisme. Karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-

⁴ Jika dikaji dalam pendidikan Islam, Ahmad Tafsir menggunakan istilah "Pendidikan Islami". Menurut Guru Besar UIN Bandung ini, kata "Islam" dalam "pendidikan islami" menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam. Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Badung: Rosdakarya, 2013), cet. Ke-2, hlm. 33

⁵ H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Tinjauan dan Perspektif Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 75

beda, maka dibutuhkan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama niscaya akan terbentuk jika setiap pribadi taat menjalankan agama masing-masing dan berjiwa nasionalis. Sebab, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, tidak saja kebaikan berupa hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga kebaikan horizontal antar sesama manusia dan lingkungannya. Begitu pula nilai-nilai nasionalisme akan melahirkan sikap toleransi (*tasamuh*) dengan rasa persaudaraan sebangsa dan senegara.

C. Urgensi Pendidikan Agama-Nasionalis

Setidaknya ada empat alasan pentingnya penerapan pendidikan agama-nasionalis. *Pertama*, alasan dogmatis. Secara dogmatis, setiap agama mengajarkan tentang kebaikan. Ajaran agama yang mendidik manusia untuk dekat dengan Tuhannya pasti berimplikasi terhadap perilaku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Kaum Muslimin, misalnya, Islam diyakini mengatur kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Islam juga menjadi rahmat bagi segenap alam (*rahmatan lil 'alamin*). Masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam dengan benar pasti berdampak positif bagi lingkungan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Alquran mengajarkan agar mereka yang beriman niscaya menebar kebaikan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (Qs. al-Anbiya'/21: 107 dan Al-A'raf/7: 56).

Kedua, alasan filosofis. Manusia adalah makhluk paling mulia dengan ragam potensi yang dimilikinya, seperti akal, kalbu dan nafsu. Potensi tersebut akan berkembang secara optimal melalui proses pendidikan. Namun, jika proses pendidikan yang dilakukan tidak seimbang dan bertentangan dengan fitrah manusia, seperti hanya menitikberatkan pada akal, maka lahirlah manusia yang pintar tanpa moral. Kepintarannya pun membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka pendidikan mesti berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah dasar manusia adalah beragama. Di sepanjang sejarah peradaban manusia, manusia tetap menyembah Tuhan. Hal ini turut membuktikan bahwa agama adalah fitrah manusia. Tanpa agama, manusia akan menjadi makhluk materi, kehilangan

jati diri, mengingkari kekuatan Ilahi, dan pada akhirnya menjadikan hidup seseorang kacau tanpa arah. Kondisi ini relevan dengan arti agama yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Jika dihubungkan berarti “tidak kacau”. Mukhtar Latif menyebut fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya dan alam sekitarnya tidak kacau. Menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitarnya tidak kacau. Ketidakkacauan ini disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang moralitas, nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai dan diberlakukan.⁶ M. Baqir ash-Shadr menyebut agama menyatukan kriteria alami—seperti cinta diri—dan kriteria yang mesti ditegakkan dalam tindakan dan kehidupan; sehingga ia dapat menjamin kebahagiaan, kenyamanan, dan keadilan.⁷

Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Immanuel Kant, seperti dikutip Chairul Anwar, menyatakan manusia hanya menjadi manusia jika berada di sekitar manusia.⁸ Karena itu manusia berkelompok, termasuk berkomitmen dalam suatu komunitas dengan aturan yang disepakati bersama. Di sinilah pentingnya negara yang direkat dengan semangat nasionalisme. Dalam pendidikan, nasionalisme dibutuhkan untuk memelihara negara sebagai kebutuhan dasar setiap manusia yang menjadi bagian dari warga negara tersebut. Elmer Harrison Wilds, seperti dikutip Hasbullah, mengungkapkan: “*Nationalism in education aims, in its ultimate analysis, as the preservation and glorification of the state. The state is usually conceived of as a society organized for the primary purpose of protecting those who make up this society from the danger of external and internal disintegration*”.⁹ Jadi, pendidikan yang

⁶ Mukhtar Latif, *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 311-312

⁷ Muhammad Baqir ash-Shadr, *Falsafatuna; Pandangan terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, Penj. Smith Alhadar, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-9, hlm. 65

⁸ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm. 260

⁹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 121-122

menumbuhkembangkan semangat nasionalisme penting dilakukan untuk merawat dan memelihara negara.

Ketiga, alasan konstitusional. Dasar dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang merajut perbedaan menjadi persatuan bangsa dengan mengakomodir kepentingan umat beragama agama dan bangsa. Agama sesungguhnya menjiwai sila lain dalam Pancasila. Perhatikanlah perisai yang tergantung di leher burung Garuda, terdapat lima gambar/symbol mewakili masing-masing lima sila. Lalu gambar sila pertama (bintang lima) diletakkan di bagian tengah sehingga bersentuhan langsung dengan empat gambar lainnya. Karena itu, Ahmad Tafsir menyebut agama merupakan *core* dari Pancasila. Menurutnya, membaca Pancasila haruslah sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan YME; 3) Persatuan Indonesia berdasarkan Ketuhanan YME; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berdasarkan Ketuhanan YME; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan YME. Bila Ketuhanan YME adalah *core* Pancasila, maka seluruh turunannya (UUD, UU, PP, Permen, dan Juknis) haruslah menempatkan Ketuhanan YME sebagai *core*.¹⁰

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Kalimat “berakar pada nilai-nilai agama” menegaskan bahwa pendidikan agama sejatinya menjadi *core* dari pendidikan nasional, di samping kebudayaan nasional sebagai kearifan bangsa yang perlu dirawat dan dilestarikan. Begitu juga rumusan tujuan pendidikan nasional, secara eksplisit disebutkan pada pasal 3, yaitu: “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), cet. ke-10, hlm. 154

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Lagi-lagi ditemukan kalimat agamais: “beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME” sebagai indikator pertama dari tujuan pendidikan nasional. Lalu tujuan tersebut dikunci dengan kalimat “menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, sebagai pertanda bahwa peserta didik menjadi bagian dari warga negara yang setia terhadap NKRI. Kehadiran UU Sisdiknas ini merupakan salah satu bentuk reformasi pendidikan yang membawa perspektif baru,¹¹ sekaligus menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju NKRI yang berkeadaban.

Keempat, alasan masa depan remaja. Dewasa ini, remaja Indonesia berada dalam ancaman yang sangat berbahaya. Sebut saja narkoba, pergaulan bebas (*free sex*), kekerasan/tauran, hingga pengaruh paham radikalisme dan terosisme serta perilaku penyimpangan moral lainnya. Jika remaja tidak diproteksi, akan merusak dan merenggut masa depan mereka. Masa depan negara ini pun terancam kehancurannya. Karena itu, remaja harus diselamatkan dengan pendidikan agama dan menguatkan semangat nasionalismenya. Agama sesungguhnya hadir untuk mendidik jiwa manusia agar tetap sehat dan stabil sehingga ia mampu mengendalikan dirinya. Demikian pula semangat nasionalisme penting dimiliki remaja sehingga bangsa ini mandiri dan bebas dari pengaruh asing yang mengancam disintegrasi bangsa.

D. Strategi Pendidikan Agamais-Nasionalis

1. Penguatan Pendidikan Agama

Pendidikan agama bagi umat beragama adalah sebuah keniscayaan.¹² Namun pendidikan Agama seringkali diidentikkan dengan lembaga pendidikan agama, seperti madrasah dan pesantren. Sementara di sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK), lebih dipahami sebagai sekolah umum dengan alasan heterogen, memiliki guru dan siswa yang bermacam-macam agama.

¹¹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-3, hlm. 10-11

¹² Abdul Azis, “Posisi Pendidikan Agama dalam Sisdiknas”, dalam Ali Muhdi Amnur (ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 188

Ironisnya, persoalan agama pun kerap kali hanya diserahkan pada guru agama semata, padahal pelajaran agama hanya 2-3 jam tatap muka dalam seminggu. Akibatnya kultur religius sulit terbentuk karena pendidikan agama dilakukan secara parsial. Kondisi inilah yang mengkhawatirkan lahirnya lulusan yang tidak berpegang teguh pada agama, bahkan berpaham sekuler.

Bangsa ini mesti mempertegas pengelolaan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun madrasah. Agama bukanlah warisan tradisi dari orang tua terdahulu. Tetapi agama adalah pilihan atas keyakinan sekaligus jalan hidup yang harus dipedomani. Untuk itu, pendidikan agama harus dilakukan dengan sengaja (*by design*) dengan proses pencerdasan, bukan alasan keturunan apalagi karena paksaan. Pendidikan Islam, misalnya, harus berlangsung di saat terjadinya interaksi antara guru muslim (apa pun mata pelajarannya) dengan siswa muslim, baik di madrasah maupun sekolah. Ada kewajiban seluruh guru muslim untuk mendidik sikap religius siswa, meskipun sang guru bukanlah mengampu mata pelajaran agama. Secara fisik sang guru menampilkan diri sebagai muslim, baik dari segi berpakaian yang menutup aurat dan penampilan tidak *tabarruj* (berlebihan). Lisannya terbiasa berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat *thayyibah*, santun dan lemah lembut, sering mengajak yang *makruf*, dan tegas melarang perbuatan *munkar*. Sikapnya peduli terhadap penanaman ajaran agama pada peserta didiknya. Menjadi teladan dalam melaksanakan ibadah di sekolah, dan sebagainya.¹³

Pendeknya, pengajaran materi agama menjadi tanggungjawab khusus guru agama, tetapi mendidik sikap beragama menjadi tanggungjawab seluruh guru yang seagama. Paradigma inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan oleh pengelola pendidikan. Keberagaman agama yang ada di sekolah jangan jadi alasan untuk menghambat penerapan agama. Sebaliknya, keberagaman agama justru memotivasi masing-masing pemeluk agama untuk menampilkan diri sebagai umat terbaik dan berprestasi yang patut diteladani.

¹³ Muhammad Kosim, *Pendidikan Agama-Nasionalis: Refleksi Hardiknas 2017*, (Padang: Harian Padang Ekspres, 2 Mei 2017), hlm. 4

Menyikapi keberagaman, konsep pendidikan multikultural patut diterapkan. Pendidikan multikultural menekankan pentingnya toleransi dengan menghargai perbedaan dan eksistensi masing-masing kelompok. Toleransi beragama bukan menghilangkan atau menyembunyikan identitas agama, tetapi memberi ruang bagi setiap umat untuk mengekspresikan keyakinannya. Pendidikan multikultural dalam konteks hubungan antar agama perlu dipertegas dengan paradigma “mengakui keberadaan agama lain; bukan mengakui kebenaran agama lain”.¹⁴ Persoalan kebenaran adalah urusan keyakinan setiap individu. Klaim kebenaran tidak boleh dibarengi dengan sikap menyalahkan atau diskrimatif terhadap orang lain.

Lebih lanjut, pendidikan multikultural diperlukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. H.A.R. Tilaar menyebut dalam perkembangannya program pendidikan multikultural tidak lagi difokuskan kepada kelompok-kelompok agama atau *mainstream* budaya, tetapi kepada pengembangan nilai-nilai demokratis.¹⁵ Tidak hanya mengakui pluralisme budaya, tetapi multikultural diarahkan kepada pengembangan rasa persatuan. Salah satu bentuk rasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat ialah rasa persatuan nasional yang merupakan kebutuhan dan keharusan, khususnya dalam menghadapi proses globalisasi.¹⁶ Implementasinya di sekolah, pendidikan multikultural bukanlah mata pelajaran terpisah, melainkan terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang relevan. Dalam mata pelajaran kewarganegaraan (*civic education*) ataupun pendidikan moral (*moral education*) merupakan wadah untuk menampung program-program pendidikan multikultural.¹⁷

Jika pendidikan agama kurang mendapat perhatian, maka sekolah tersebut bisa dipastikan akan gagal mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bukankah tujuan Sisdiknas mewujudkan peserta didik yang

¹⁴ Muhammad Kosim, “Sistem Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural”, dalam Zainal Abidin EP. Dan Neneng Habibah (ed.), *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, 2009), hlm. 233-234

¹⁵ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan; Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 484

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 492

¹⁷ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 218

beriman, bertakwa dan berakhlak mulia? Tiga butir utama dari tujuan tersebut mustahil dapat diwujudkan tanpa keseriusan mengelola pendidikan agama. Maka sepatutnya setiap warga bangga menampilkan identitas agamanya masing-masing tanpa merendahkan atau menghina pemeluk agama lain. Pendidikan agama ditanamkan untuk mengoptimalkan fitrah manusia. Agama itu fitrah. Mereka yang tidak menaati agama adalah manusia yang mengingkari fitrahnya. Jika seseorang keluar dari fitrahnya, sikapnya tak lagi mencerminkan manusia sebagai makhluk mulia yang bermoral dan berbudaya tinggi.

Selain itu, pendidikan kita selama ini lebih fokus pada lembaga pendidikan formal, sementara pendidikan nonformal, terutama informal, kurang mendapat perhatian. Padahal keluarga merupakan basis utama pendidikan agama. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dalam keluarga terjadi penanaman nilai, pembiasaan perilaku baik, termasuk pembentukan pribadi agamais. Orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan moral. Mereka jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap perkembangan moral anak-anaknya.¹⁸

Orang yang amat berperan dalam keluarga adalah ibu. Penyair al-Hafizh Ibrahim pernah menulis “Ibu adalah sekolah (*al-umm madrasah*), bila disiapkan dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat”.¹⁹ Persoalannya, sudahkah setiap ibu/orang tua memiliki pemahaman dan terampil mendidik anak-anaknya untuk taat beragama dan berkarakter. Untuk itu, para ibu perlu dibekali bagaimana mendidik anak yang ideal. Secara alamiah, ibu memang bisa mendidik anak-anaknya. Naluri keibuannya dengan mudah menenangkan anak-anaknya saat menangis. Itu tak perlu dipelajari. Namun pendidikan dari ibu bukan hanya alamiah. Tetapi mereka perlu dibekali secara ilmiah dan ilahiah.

Secara ilmiah, ibu perlu diperkenalkan tentang psikologi anak, baik terkait dengan bahasa, emosi, perkembangan otak, hingga pola pikir dan perilaku anak. Secara psikologis, misalnya, jika anak dibentak akan

¹⁸ Thomas Lickona, *Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter*, Penj. Juma Abdu Wamaungo, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 48

¹⁹ Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Penj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 142

memutus atau mematikan perkembangan sel-sel sarafnya sehingga perkembangan otak dan emosinya di kemudian hari akan terganggu. Di sinilah dibutuhkan kesabaran dan kelembutan dari seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, ibu butuh pencerahan dari para psikolog anak. Begitu juga dari ahli gizi, dibutuhkan untuk membimbing para ibu menyajikan menu yang bervariasi dan bergizi bagi anak-anaknya sehingga pertumbuhan fisiknya sehat dan kuat.

Secara ilahiah, ibu harus dibekali pula dengan cara mendidik anak menurut ajaran agama. Dalam Islam, misalnya, anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang mesti dipertanggungjawabkan dengan mendidiknya menjadi 'abdullah sekaligus sebagai *khalifah* di muka bumi. Di sisi lain, anak juga disebut Alquran sebagai *zinah*/perhiasan (Qs. al-Kahfi/18 ayat 46), *fitnah*/ujian atau cobaan (Qs. al-Anfal/8 ayat 28), dan *laib wa lahwu*/permainan dan senda gurau (al-Hadid/57: 20).²⁰ Karena itu, Islam memuat ajaran yang cukup detil tentang mendidik anak. Pada fase prakonsepsi, misalnya, Islam mengajarkan agar memilih jodoh dengan mengedepankan pasangan yang shaleh/shalehah, melakukan pernikahan secara sah, menghindari zina, dan seterusnya. Begitu pula dalam kandungan, sang ibu yang mengandung banyak berzikir, apalagi selama mengandung ibu tetap dalam keadaan suci sehingga memungkinkannya untuk tetap melaksanakan ibadah khusus seperti shalat, baca Alquran dan zikir; sedangkan ayah memberikan makanan yang halal. Ketika lahir, Islam menuntun agar anak diadzankan. Setelah itu disyariatkan akikah, tahnik, cukur rambut dan pemberian nama yang baik. Di usia 7 tahun membiasakan shalat. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan agar orang tua mendidik anaknya pandai memanah, berenang, berkendara, dan sebagainya.²¹

Selama ini, pemahaman ibu mendidik anak secara ilmiah dan ilahiah tidak mudah diperoleh. Karena itu, kita perlu “sekolah ibu”. Para ibu harus

²⁰ Ahzami Sami'un Jazuli, *Menjelajah Kehidupan dalam al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas tema-tema Kehidupan* (al-Hayah) dalam *al-Qur'an*, Penj. Tim Penerbit Wahda, (Jakarta: al-Itishom, 2005), hal. 187

²¹ Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, Penj. Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid ke-1, hlm. 61 dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*, Penj. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 13-35

terdidik pula menjadi ibu teladan dan ideal bagi pendidikan anak-anaknya. Pemerintah perlu memfasilitasi para ibu untuk menyiapkan dirinya sebagai *al-ummu madrasah*. Sekolah ibu bisa dilakukan di jalur pendidikan formal, seperti di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan secara terintegrasi pada mata kuliah tertentu bagi mahasiswa yang kelak menjadi ibu. Atau pada jalur pendidikan nonformal, seperti majlis taklim, kegiatan dharma wanita, PKK, dan sejenisnya. Pemerintah juga bisa memfasilitasinya dengan berbagai kegiatan, melalui BKKBN, dan beberapa kementerian terkait. Begitu Kementerian Agama, melalui KUA, bisa melakukan pelatihan pra-nikah yang memuat materi persiapan menjadi ibu ideal secara ilmiah dan ilahiah di atas. Di samping itu, sekolah formal yang tidak sedikit mengeluh akan kurangnya dukungan orang tua terhadap pembinaan karakter peserta didik, juga dapat mengembangkan kegiatan *parenting day*, yaitu mengundang orang tua lalu memberikan pembekalan atau pelatihan tentang pendidikan anak perspektif ilmiah dan ilahiah di rumah tangga pada hari tertentu secara terjadwal dan berkala.

Begitu pula penguatan pendidikan agama di jalur non-formal, peran serta masyarakat perlu dilakukan. Optimalisasi fungsi rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat merupakan usaha riil pendidikan agama nasionalis. Sekolah juga bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan menugaskan peserta didiknya berperan aktif di rumah ibadahnya masing-masing.²² Di rumah ibadah, tidak saja berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah ritual, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama. Tokoh agama merupakan *figure sentral* di rumah ibadah. Tokoh agama diharapkan turut mengajarkan agama yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

²² Kerjasama sekolah dengan masyarakat melalui rumah ibadah telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Sejak tahun 2004, Pemda Kota Padang menugaskan peserta didik dan guru yang beragama Islam (SD/MI kelas atas, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) setiap bulan Ramadhan melaksanakan Pesantren Ramadhan di masjid/mushalla sesuai domisili peserta didik/guru masing-masing selama 7-14 hari. Pada kegiatan Pesantren Ramadhan ini, peserta didik memperoleh pendidikan agama baik penambahan wawasan ke-Islam-an (kognitif), praktik ibadah (psikomotor) maupun pembiasaan akhlak Islami (afektif).

2. Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan

Persoalan selanjutnya adalah tentang pentingnya nasionalisme. Tak jarang pendidikan agama dicurigai loyalitasnya terhadap NKRI. Isu radikalisme yang berujung pada terorisme sebagian dialamatkan pada lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren. Begitu pula kegiatan agama di sekolah, seperti Rohis di SMA/SMK pernah pula dinilai menanamkan benih-benih pemahaman agama yang fundamental dan cenderung radikal. Seperti hasil penelitian survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2010, sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Lalu Abdul Munip menulis, di antara sarana yang ditempuh untuk menyebarkan paham radikalisme adalah melalui pembinaan Rohis SMA/SMP. Menurutnya, kegiatan siswa yang tergabung dalam Kerohanian Islam (Rohis) juga bisa menjadi sasaran empuk ideologi radikal. Kegiatan-kegiatan kesiswaan sering disusupi oleh pihak luar yang diundang untuk mengisi kegiatan tersebut.²³

Kementerian Agama pun merespons isu itu dengan mempopulerkan “*Islam Rahmatan lil ‘Alamin*”. Lembaga Pendidikan Islam (LPI) tidak boleh mengajarkan benih-benih paham radikal dan mengancam keutuhan NKRI. Sebaliknya, LPI harus fokus terhadap kajian Islam yang moderat, *wasathiyah*, dan menyebar *rahmat* bagi segenap alam.

Menyikapi persoalan ini, sekolah dan madrasah perlu merancang dan menerapkan pendidikan yang memupuk semangat nasionalisme. Lagi-lagi, semangat nasionalisme jangan dididik secara parsial dengan menyerahkannya kepada guru PKN (*civic education*) semata, tetapi menjadi bagian integral dari seluruh program dan kegiatan sekolah/madrasah. Pendidikan nasionalis diharapkan mampu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Keragaman budaya, suku, bahasa dan agama merupakan keniscayaan dan fakta yang tak terbantahkan. Keberagaman itu harus menjadi kebanggaan sekaligus kekuatan untuk membangun bangsa yang berkeadaban.

²³ Abdul Munip, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume I, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 167

Pendidikan nasionalis seharusnya menjadi sebuah gerakan nasional. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendidikan empat pilar kebangsaan yang beberapa tahun terakhir banyak disosialisasikan oleh lembaga legislatif. Jika di masa orde baru dikenal program “P4”, maka di era ini perlu mendesain “Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan” yang berorientasi pada pendidikan nasionalis di sekolah dan madrasah. Empat pilar kebangsaan jangan sekedar disosialisasikan dalam bentuk ceramah, seminar, talk show atau *tour* dari kampus ke kampus, tetapi perlu didesain dalam bentuk pelatihan (*training*) untuk pelajar dan mahasiswa dengan pendekatan saintifik, rasional, pembiasaan, keteladanan serta pendekatan integral dan holistik.

Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik berupa penyajian materi, terutama kegiatan praktis yang menanamkan semangat nasionalisme. Setiap peserta didik perlu memperoleh pengalaman belajar tentang empat pilar tersebut sehingga mereka memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam wilayah NKRI.²⁴ Hal ini penting dilakukan untuk tegaknya bangsa yang mandiri. Apalagi di era globalisasi yang sangat kompetitif, tanpa semangat nasionalisme, bangsa ini bisa terjajah oleh hegemoni bangsa asing, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, hingga seni dan budaya.

3. Optimalisasi PPK

Pendidikan karakter telah berjalan sejak tahun 2010. Di tahun 2016, pemerintah melalui Kemendikbud tetap melanjutkan kegiatan tersebut dengan istilah Penguatan Pendidikan Karakter, disingkat PPK, dengan motto: “Senang Belajar di Rumah Kedua”. Bahkan Menteri Kemendikbud, Prof. Muhadjir dalam beberapa kali pertemuan menginginkan porsi karakter lebih besar dari pada muatan akademik, perbandingan 70-30 untuk SD, dan

²⁴ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. xi

60-40 untuk SMP. Pentingnya pendidikan karakter tidak sekedar respons terhadap perilaku penyimpangan moral yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mengancam bahkan merusak masa depan generasi bangsa. Tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter merupakan sebuah kebutuhan. Pendidikan karakter merupakan *core* dari pendidikan itu sendiri, sebab hakikat pendidikan adalah “memanusiakan manusia”. Fitrah manusia itu cenderung dan mencintai kebaikan dan kebenaran (*hanif*).²⁵ Hal ini relevan dengan konsep Ryan dan Bohlin yang menyebut karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*knowing the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*).²⁶ Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik—kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan.²⁷

PPK yang dikembangkan menekankan pada lima utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK, yaitu karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelimanya relevan dengan Pancasila, yaitu sila pertama menekankan pada karakter religius, sila kedua menekankan karakter integritas, sila ketiga menekankan karakter nasionalis, sila keempat menekankan karakter gotong royong, sedangkan sila kelima menekankan karakter mandiri. Hemat penulis, dari lima nilai utama karakter tersebut, karakter religius dan nasionalis memiliki peran yang amat penting. Jika seseorang memiliki karakter religius, niscaya ia akan bersifat jujur (integritas), peduli dan suka menolong sesama (gotong royong), dan tidak tergantung pada orang lain (mandiri). Namun tidak semua orang yang religius sepakat dengan konsep bernegara; sebaliknya tidak semua pula orang yang bersifat nasionalis akan taat menjalankan perintah agama. Maka keduanya harus mendapat penekanan oleh sekolah sebagai bagian penting dalam pendidikan agamais-nasionalis, tanpa mengabaikan nilai-nilai

²⁵ Muhammad Kosim, *PPK Berbasis Kearifan Lokal*, Padang: Harian Padang Ekspres, 18 Oktober 2016, hlm. 4

²⁶ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 11

²⁷ Thomas Lickona, *op.cit.*, hlm. 82

karakter lainnya. Dalam buku Konsep dan Pedoman PPK diuraikan pula bahwa nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Sedangkan Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.²⁸

PPK diimplementasikan dengan tiga pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga basis ini mesti dioptimalkan untuk menanamkan pendidikan agamais-nasionalis. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca kitab suci, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing merupakan kultur sekolah yang sarat dengan karakter religius yang perlu ditumbuhkembangkan. Begitu pula menyanyikan lagu kebangsaan, upacara bendera, mengenal dan menghayati perjuangan pahlawan bangsa, adalah kegiatan di sekolah yang perlu dirawat dan kembangkan dengan kreatif dan inovatif. Karena itu, program PPK perlu dioptimalkan dengan komitmen dan dukungan warga sekolah, pemerintah dan masyarakat. Optimalisasi PPK merupakan pintu masuk bagi sekolah untuk mempertegas peran pendidikan sebagai proses “memanusiakan manusia” yang pada hakikatnya amat mulia karena integrasi iman, ilmu dan akhlaknya.

²⁸ Hendarman, dkk (Tim Penyusun), *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Tim PPK Kemdikbud, 2016), hlm. 8

E. Penutup

Hubungan antar agama dan negara tidak boleh dipertentangan dan dibenturkan. Bangsa ini didirikan oleh para pahlawan dengan dorongan ajaran agama yang anti penindasan dan penjajahan serta atas ikatan semangat kebangsaan yang tinggi. Kehadiran agama akan memperkuat keutuhan bangsa. Sebaliknya, kesatuan bangsa akan memberikan kebebasan dan perlindungan bagi warganya untuk menjalankan perintah agama sesuai keyakinannya masing-masing. Era reformasi yang dibarengi dengan reformasi pendidikan nasional mesti memberi penguatan terhadap pendidikan agamais-nasionalis sehingga hubungan antar agama dan negara tetap harmonis dan bersinergi membangun Indonesia yang berperadaban dan berkeadaban.

Pendidikan agamais-nasionalis merupakan gagasan yang patut dikembangkan demi keutuhan NKRI. NKRI mesti tampil sebagai negeri yang kuat dan memiliki distingsi dibandingkan dengan negara-negara lain. Distingsi, keunikan atau kekhasan negeri ini adalah warga negaranya yang taat menjalankan perintah agama masing-masing dengan ikatan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Bhinneka Tunggal Ika menjadi keniscayaan, Pancasila merekat perbedaan, dan UUD 1945 menjadi aturan untuk meraih cita-cita bangsa yang berperadaban dan berkeadaban. Inilah modal sekaligus kekuatan utama khazanah bangsa Indonesia.

Gagasan sederhana ini turut terinspirasi dari pemikiran Prof. H.A.R. Tilaar di beberapa karyanya yang peduli terhadap kualitas pendidikan nasional. Penulis berharap, gagasan ini menjadi salah satu kado di usianya yang ke 85 tahun. Selamat buat Prof. H.A.R. Tilaar, teruslah berkarya dan menginspirasi anak bangsa meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang berwibawa dan berjaya.

Daftar Bacaan

- al-Abrasyi, Muhammad Athiyyah, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Penj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2003
Anwar, Chairul, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: SUKA Press, 2014

- Azis, Abdul, "Posisi Pendidikan Agama dalam Sidiknas", dalam Ali Muhdi Amnur (ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Hendarman, dkk (Tim Penyusun), *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah*, Jakarta: Tim PPK Kemdikbud, 2016
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*, Penj. Fauzi Bahreisy, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Jazuli, Ahzami Sami'un, *Menjelajah Kehidupan dalam al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas tema-tema Kehidupan (al-Hayah) dalam al-Qur'an*, Penj. Tim Penerbit Wahda, (Jakarta: al-Itishom, 2005), hal. 187
- Kosim, Muhammad, "Sistem Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural," dalam Zainal Abidin EP. Dan Neneng Habibah (ed.), *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, 2009
- _____, *Pendidikan Agama-Nasionalis: Refleksi Hardiknas 2017*, Padang: Harian Padang Ekspres, 2 Mei 2017
- _____, *PPK Berbasis Kearifan Lokal*, Padang: Harian Padang Ekspres, 18 Oktober 2016
- Latif, Mukhtar, *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta: Kencana, 2014
- Lickona, Thomas, *Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter*, Penj. Juma Abdu Wamaungo, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Munip, Abdul, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume I, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 167
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2007, cet. ke-3
- ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Falsafatuna; Pandangan terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, Penj. Smith Alhadar, Bandung: Mizan, 1999, cet. Ke-9
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, cet. ke-10
- _____, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Rosdakarya, 2013, cet. Ke-2
- Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- _____, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Tinjauan dan Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- _____, *Perubahan Sosial dan Pendidikan; Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, Penj. Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid ke-1